



**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA & KEHUMASAN
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Jalan Tanah Abang I No. 1 Blok C Lt. 2
Telp. (021) 3441417 Fax. (021) 3441417

GUNTINGAN BERITA



HARI : **Rabu** UNIT KERJA :

TGL : **17 November 2021**

8 Genset Disiapkan Untuk Pasokan Saat Bencana

Pos Kota - Ekonomi - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Provinsi DKI Jakarta - - 17 November 2021 -

8 Genset Disiapkan untuk Pasokan Listrik Saat Bencana

GAMBIR (Poskota) - Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) Jakarta Pusat (Jakpus) menyiapkan delapan unit genset untuk pasokan energi listrik di titik pengungsian saat terjadi bencana.

Kasudin Nakertrans dan Energi Jakpus, Fidyah Rokhim mengatakan, pihaknya memiliki delapan unit genset dengan daya kapasitas bervariasi mulai dari 10 KVA 2 unit, 12.5 KVA 2 unit, 80 KVA 2 unit dan 100 KVA 2 unit.

"Kondisi genset seluruhnya dalam kondisi baik dan siap digunakan di lokasi pengungsian," kata Fidyah

saat dikonfirmasi, Selasa (16/11/2021).

Genset yang digunakan bukan untuk menghidupkan lampu di rumah warga di lokasi bencana baik kebakaran maupun banjir, melainkan untuk penerangan di posko darurat.

Suplai pasokan listrik untuk tenda pengungsian akan selalu dicukupi. Termasuk penerangan di tenda pengungsian dan atau tempat pengungsian saat banjir atau kebakaran.

"Kita pasti support pasokan energi listrik di titik pengungsian apabila terjadi banjir di lokasi tersebut," ucap Fidyah. (cr-05/ta)



Genset untuk korban bencana alam di lokasi pengungsian di wilayah Jakarta Pusat. Poskota/ist

Berita Media Cetak

Ratusan Rumah Bakal Tergusur Proyek Tol Semanan - Sunter

Pos Kota - Pemerintahan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Provinsi DKI Jakarta - - 17 November 2021 -

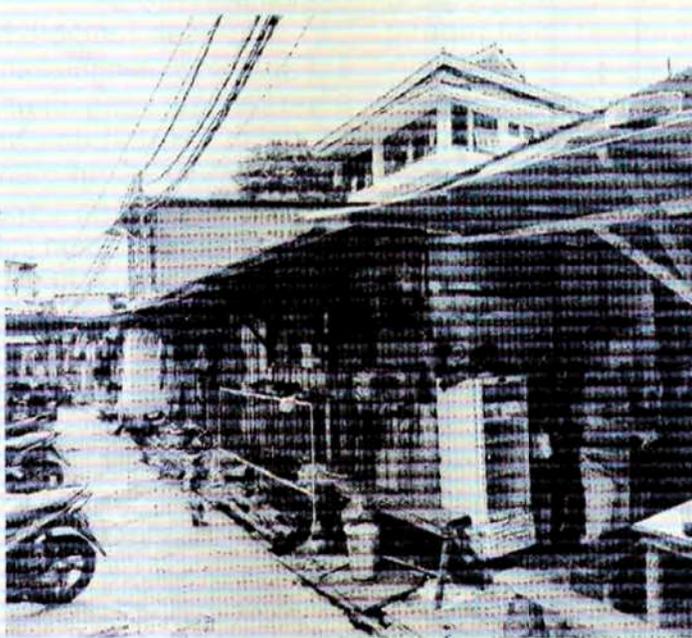
Ratusan Rumah Bakal Tergusur Proyek Tol Semanan-Sunter

KEMAYORAN (Poskota) - Ratusan rumah di wilayah Kecamatan Kemayoran bakal terkena proyek pembangunan Tol Semanan - Sunter. Direncanakan pembangunannya dimulai Januari 2022.

Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Hartono mengatakan direncanakan pembangunan tol dengan panjang 22 kilometer sudah berjalan tahun depan. Ratusan rumah, sekolah dan panti akan terkena dampak pembangunan.

"Kalau rumah kurang lebih ada 200 rumah warga yang akan digusur. Kemudian 2 sekolah negeri dan satu panti," ucap Hartono saat ditemui di wilayah Kemayoran, Selasa (16/11/2021).

Ratusan rumah yang digusur berada di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Serdang dan Kebon Kosong. Hartono men-



Poskota/Fahmi

Lokasi sejumlah pemukiman di kawasan proyek Tol Semanan-Sunter di Kemayoran, Jakarta Pusat.

gatakan mengenai dua sekolah dan panti akan dibangun kembali di lokasi yang akan ditentukan dari pihak Pemerintah Daerah.

"Agar tidak mengganggu belajar mengajar, dipastikan kalau sekolah dibangun dulu baru akan digusur. Begitu juga dengan panti," terangnya.

Sedangkan mengenai nasib ratusan rumah warga yang digusur, Hartono enggan memberikan keterangan lebih jelas.

Ditempat terpisah, Sartini salah satu warga mengatakan bahwa dirinya berharap penggusuran rumah yang telah ditempati selama 18 tahun mendapat ganti rugi.

Dirinya keberatan jika pemerintah dalam pembangunan jalan tol ini tidak melihat nasib warga kecil.

"Saya di sini hanya berdagang, tolonglah pemerintah ada punya hati nurani kepada kami. Jangan asal main gusur aja. Kalau ada pergantian rugi yang layak kita juga mau keluar," cetusnya saat diwawancarai di rumahnya yang beralamat di RT 10 RW 09, Kelurahan Kebon Kosong.

Hal yang sama diungkapkan, Aninda, ibu rumah tangga yang sudah mengetahui bahwa rumahnya akan terkena gusuran. Namun hingga saat ini belum ada sosialisasi baik dari kelurahan, kecamatan ataupun pihak pemerintah yang hendak bangun tol.

"Belum ada sosialisasi, hanya ada survei lihat-lihat begitu aja. Kita warga di sini minta perhatian nasib kami," terangnya. (cr-05)

Berita Media Cetak

Anies Pastikan UMP DKI Tahun 2022 Naik

Pos Kota - Ekonomi - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Provinsi DKI Jakarta - - 17 November 2021 -

Anies Pastikan UMP DKI Tahun 2022 Naik

◆ Besarannya Diumumkan 19 November

GAMBIR (Poskota) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 bakal naik. Namun, saat ini masih dilakukan pembahasan terakhir mengenai besarannya.

"Ada jadwal rakor (rapat koordinasi) soal UMP nanti dari situ kita akan tahu (besaran kenaikan UMP) ya," ujar Anies di Balai Kota DKI, Selasa (16/11/2021).

Anies menuturkan, Pemprov DKI sudah membahas masalah ini dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Pemerintah juga sudah mengeluarkan instruksi soal kenaikan UMP di daerah-daerah Indonesia.

"UMP nih baru dibahas dengan pak Menko. Kan makanya beliau (Mahfud MD) pulang lebih awal karena rapat soal UMP itu," tuturnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Andri Yansyah juga memastikan bakal ada kenaikan UMP DKI tahun 2022. Meski begitu, pihaknya baru akan mengumumkan besarannya pada 19 November 2021.

"Kenaikan insyaallah ada kenaikan, untuk besarannya tunggu saja di tanggal 19 (November)," kata Andri kepada wartawan.

Sebagaimana diketahui, kalangan buruh sudah mendesak dengan hitungannya. Mereka meminta ada kenaikan UMP

2022 sampai 7-10%. Polemik seputar upah minimum adalah 'ritual' tahunan di Indonesia.

Kalangan pengusaha menilai permintaan buruh mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 7%-10% tidak berdasar.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) Adi Mahfudz, menjelaskan UMP merupakan domain pemerintah untuk menetapkan.

Peningkatan UMP sampai 10% tentu tidak realistis dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Dari sisi pelaku usaha di beberapa sektor masih terdampak pandemi, dan menurut dia untuk stabil butuh 2-3 tahunan itu tidak mudah. (deny/ta)

Begal yang Tewaskan Karyawati Basarnas Pesta Narkoba Sebelum Beraksi

Lampu Hijau - Pemerintahan - SATPOL PP - Provinsi DKI Jakarta - Tindakan Kriminalitas - 17 November 2021 -

Begal yang Tewaskan Karyawati Basarnas Pesta Narkoba Sebelum Beraksi

Lamjo Jak, Jakarta

ADR alias Topeng, begal yang membacok karyawati Badan SAR Nasional hingga tewas, melakukan aksinya dalam pengaruh narkoba. "Sebelum melakukan aksi, dia pesta narkoba dulu kemudian mereka berangkat," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Hariyanto, Selasa (16/11/2021).

Setyo mengatakan, ADR sengaja mengonsumsi narkoba untuk meningkatkan nyalinya saat beraksi. Namun rupanya penggunaan narkoba itu berakibat fatal. ADR yang semula berniat merampas harta benda milik korban justru membacok korban hingga tewas. "Dia mengonsumsi narkoba agar bernyali. Dia tidak tahu itu akan berakibat fatal dan korban-nya meninggal dunia. Jadi, dia asal sabet pakai celurit mengenai korban hingga meninggal," kata Setyo.

ADR ditangkap di tempat persembunyiannya di Gadog, Kabupaten Bogor pada Minggu (14/11/2021) lalu. Ketiga rekannya yang ikut dalam aksi begal itu yakni R, MG, dan MR sudah ditangkap lebih dulu. Adapun aksi perampokan berujung maut itu terjadi di dekat kantor Basarnas di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada dini hari akhir Oktober lalu.

Korban berinisial MN (22) saat itu tengah menunggu ojek online di pinggir jalan bersama pacarnya. Tiba-tiba datang 4 orang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor. Lalu 2 orang turun dari motor sambil menenteng senjata tajam. Salah satu pelaku lalu membacok korban dan merampas telepon seluler milik korban. Korban sempat dilarikan ke RS Hermina, namun nyawanya tak tertolong. Ia meninggal dunia saat menjalani perawatan rumah sakit pukul 02.47 WIB. (ULI)

Berita Media Cetak

Berita Foto : Operasi Zebra

Pos Kota - Ekonomi - DINAS PERHUBUNGAN - Provinsi DKI Jakarta - - 17 November 2021 -



Poskota/Ahmad Tri Hawaari

Operasi Zebra

Petugas kepolisian memeriksa kelengkapan surat-surat pengendara saat Operasi Zebra Jaya 2021 di Jalan Rawasari, Jakarta Pusat, Selasa (16/11/2021). Operasi Zebra Jaya yang digelar pada 15-24 November 2021 tersebut dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat saat berkendara.



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Beritajakarta.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

400 Guru Honorer di Jakpus Dapat Bantuan Dana dan Bingkisan

Selasa, 16 November 2021 Reporter : Anita Karyati Editor : Erikyanri Maulana

(Foto: Anita Karyati - Beritajakarta.id)



Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat bersama Baznas Bazis Jakarta Pusat menyalurkan bantuan untuk 400 guru honorer. Penyerahan bantuan berlangsung di Masjid Al Fauz, Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang 1, Gambir.

Bantuan ini diberikan untuk 400 guru honorer di mana masing-masing penerima mendapatkan Rp 1.000.000

Plt Koordinator Baznas Bazis Jakarta Pusat, Ali Ridho mengatakan, bantuan dana senilai Rp 400 juta tersebut diberikan

untuk guru honorer langsung ke rekening penerima melalui Bank DKI.

"Bantuan ini diberikan untuk 400 guru honorer di mana masing-masing penerima mendapatkan Rp 1.000.000. Selain itu para guru juga menerima bantuan berupa sembako hasil sumbangan dari Bank DKI," ujarnya, Selasa (16/11).

Dikatakan Ali Ridho, bantuan ini berasal dari sedekah nasabah Bank DKI, ASN, pengusaha, dan sumber lainnya.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan, bantuan ini sangat berarti bagi para guru honorer. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan atas dedikasi para guru honorer selama ini. Bantuan ini juga sebagai stimulus dan motivasi para guru untuk melahirkan dan menginvestasi generasi penerus terbaik di masa yang akan datang.

"Saya berterima kasih kepada para guru honorer yang telah berkontribusi positif dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Saya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," katanya.

Atjup Suhadi (55), salah seorang penerima bantuan mengaku bersyukur dan senang. Atjup mengaku sudah menjadi guru honorer di beberapa sekolah sejak tahun 1987.

"Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dana dan bingkisan. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap guru honorer. Semoga bantuan ini bisa menambah motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak," tandas Atjup yang berprofesi sebagai guru Pendidikan Agama Islam.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Beritajakarta.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : ① 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Optimalisasi Pelayanan Publik, Gubernur Anies Pastikan Jakarta Menjadi Daerah Bebas Pungli

Selasa, 16 November 2021 Reporter : Yudha Peta Ogara Editor : Erikyanri Maulana



(Foto: Istimewa - Beritajakarta.id)

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, salah satunya bebas dari pungutan liar (pungli). Untuk mewujudkannya, dilakukan pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari Pungli Tahun 2021, pada Selasa (16/11).

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja bersama di dalam menangani persoalan pungli

Acara tersebut turut dihadiri Menkopolhukam RI, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hadir secara langsung menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menguatkan dan meneguhkan komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bebas pungli.

"Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja bersama di dalam menangani persoalan pungli di Jakarta. Terkait hal ini, Jakarta menyatakan komitmennya di seluruh wilayahnya, kita ini secara administrasi terbagi menjadi 6 wilayah. Semoga seluruh wilayah bebas dari pungli," ujar Gubernur Anies, di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : **Selasa** Tanggal : **16** Bulan : **November** Tahun : **2021**

MEDIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indo Pos 2. JawaPos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo 	<ol style="list-style-type: none"> 6. LampuHijau 7. Media Indonesia 8. Nonstop 9. Poskotanews.com 10. Pelita 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 16. HarianTerbit 17. SinarHarapan 18. Beritajakarta.id
--------------	--	---	---	--

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Gubernur Anies menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pungli sebagian besar karena penyalahgunaan sistem. Namun, ia juga menjabarkan, ada tiga faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pungli, yakni faktor kebutuhan, keserakahan, hingga penyalahgunaan sistem.

"Pada faktor kebutuhan, seluruh jajaran di DKI Jakarta diberikan tunjangan yang mencukupi untuk hidup layak di Jakarta. Jadi, secara alasan kebutuhan, tidak lagi kebutuhan, karena sudah dicukupi. Kedua, pada sistem, saat ini di Jakarta hampir semuanya dilakukan digitalisasi atas seluruh proses perizinan, dan pelayanan hampir semua dilakukan secara digital, di mana kita memiliki JAKI (Aplikasi Jakarta Kini). Terakhir, keserakahan ini tidak ada obatnya. Itu bisa dihentikan dengan rasa takut, Insya Allah akan memberikan efek jera. Jadi, kita berharap bahwa tiga faktor di mana terjadi pungutan-pungutan liar mudah-mudahan bisa kita kendalikan," tambah Gubernur Anies.

Komitmen mewujudkan kota bebas pungli merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberantasan pungutan liar dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) di tingkat provinsi dan tingkat wilayah kota/kabupaten administrasi. Unit Pemberantasan Pungutan Liar merupakan kolaborasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi, Ombudsman, dan Instansi terkait lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan aksi nyata pada 2021 dengan melaksanakan 819 kegiatan pencegahan, 704 kegiatan intelijen, 305 kegiatan penindakan dan 250 kegiatan yustisi dalam rangka pemberantasan pungutan liar di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, berbagai macam inovasi pelayanan publik terus dikembangkan dalam rangka memastikan optimalisasi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel antara lain melalui:

- Digitalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik,
- Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi secara Online,
- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) secara terpadu,
- Membuka kanal pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik,
- Implementasi Jakarta Development Colaboration Network (kini dikenal sebagai Festival Kolaborasi Jakarta) yang merupakan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam membangun kota Jakarta di mana Pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator,
- Implementasi aplikasi Jaki sebagai platform berbagai layanan di Jakarta,
- Implementasi aplikasi Jakpreneur yang merupakan platform untuk mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif agar dapat memajukan usaha berskala mikro, kecil hingga menengah.

Pemprov DKI berkomitmen memastikan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan pungutan liar berjalan secara efektif, antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia, dan kecukupan anggaran, serta sinergisitas pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dengan semua pihak.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga terus mengajak seluruh pihak terkait dalam mengambil peran untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar di wilayah kerja masing-masing.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Beritajakarta.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 16 November 2021

Selasa, 16 November 2021 Reporter : Aldi Geri Lumban Tobing Editor : Toni Riyanto
(Foto: Istimewa - Beritajakarta.id)



Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus berupaya mengendalikan pandemi COVID-19. Seiring dengan menerapkan 3T, vaksinasi COVID-19 juga digalakkan pada sejumlah kelompok prioritas. Kendati demikian, masih dibutuhkan peran serta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Seminggu terakhir ada 104.059 orang dites PCR

Mengingat, vaksinasi COVID-19 saat ini hanya mengurangi dampak keterpaparan, masih terdapat kemungkinan tertular dan menularkan virus COVID-19 jika longgar terhadap protokol kesehatan dalam keseharian. Hal ini terlihat dari kasus positif yang masih fluktuatif dan kini mengalami kenaikan. Butuh kerja bersama untuk memutus rantai penularan ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 13.259 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 11.402 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 79 positif dan 11.323 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 42.525 orang dites, dengan hasil 16 positif dan 42.509 negatif.

Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. "Target ini telah Jakarta lampau selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 104.059 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 673.883 per sejuta penduduk," terang Dwi, seperti dikutip dari siaran pers.PPID Provinsi DKI Jakarta.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 27 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 625 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 862.904 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : **Selasa** Tanggal : **16** Bulan : **November** Tahun : **2021**

MEDIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indo Pos 2. JawaPos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo 	<ol style="list-style-type: none"> 6. LampuHijau 7. Media Indonesia 8. Nonstop 9. Poskotanews.com 10. Pelita 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 16. HarianTerbit 17. SinarHarapan 18. Beritajakarta.id
--------------	--	---	---	--

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 848.710 dengan tingkat kesembuhan 98,4%, dan total 13.569 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.

Untuk *positivity rate* atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,5%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 12%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Untuk Vaksinasi Program, total dosis 1 saat ini sebanyak 11.016.792 orang (123,2%), dengan proporsi 67% merupakan warga ber-KTP DKI dan 33% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 8.605 orang. Sedangkan, total dosis 2 kini mencapai 8.735.236 orang (97,7%), dengan proporsi 70% merupakan warga ber-KTP DKI dan 30% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 31.305 orang.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta terus menyediakan tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU dalam penanganan COVID-19. Hingga 14 November 2021, dari 140 RS yang merawat COVID-19, untuk tempat tidur isolasi sejumlah 4.337, persentase keterisiannya sebesar 4% dengan total pasien isolasi sebanyak 172 orang. Sedangkan, untuk tempat tidur ICU sejumlah 707, persentase keterisiannya sebesar 10% dengan total pasien ICU sebanyak 74 orang.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PPKM lainnya, seperti pelanggaran di restoran/rumah makan, serta pelanggaran perkantoran, tempat usaha, dan tempat industri. Sanksi yang diberlakukan berupa kerja sosial, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha.

Berdasarkan laporan harian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada 15 November 2021, telah dilakukan penertiban operasi masker dengan total denda sebesar Rp 1.250.000. Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.

Pemprov DKI Jakarta menyarankan, untuk melakukan vaksinasi, warga dapat langsung ke tempat vaksinasi. Namun, untuk mempercepat proses vaksinasi, warga disarankan mendaftar *online* melalui aplikasi JAKI atau situs corona.jakarta.go.id/vaksinasi. Dengan mendaftar secara *online*, warga dapat memilih waktu dan tempat vaksinasi sendiri, sekaligus bisa melakukan *pre-screening* tes *online*.

Untuk menemukan tempat vaksinasi, warga juga mengeceknya melalui aplikasi google maps. Hanya dengan menuliskan “vaksin COVID-19”, warga dapat menemukan lokasi serta dibantu informasi jalur menemukan lokasi yang dipilih.

- Adapun kategori warga 18+ yang dapat divaksinasi di DKI Jakarta adalah:
- Warga ber-KTP DKI Jakarta,- Warga ber-KTP dari luar DKI Jakarta, tetapi berdomisili di DKI Jakarta (membawa keterangan domisili diperoleh dari petugas RT, tidak harus dari ketua RT),
 - Pekerja di DKI Jakarta yang ber-KTP dari luar DKI Jakarta (membawa keterangan dari tempat kerja).

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : **Selasa** Tanggal : **16** Bulan : **November** Tahun : **2021**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Beritajakarta.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : **1**, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Kolom : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Waspada Hujan Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Selasa, 16 November 2021 Reporter : Anita Karyati Editor : Erikyanri Maulana



(Foto: doc - Beritajakarta.id)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan hari ini. Warga diminta tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi.

Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada siang hingga sore hari

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada siang hingga sore hari," tulis peringatan dini BMKG di laman resminya, Selasa (16/11).

Untuk prakiraan cuaca siang hari nanti, hujan petir di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan; hujan ringan di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara; hujan sedang di Jakarta Timur; serta berawan di Kepulauan Seribu.

Pada malam hari, hujan ringan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta berawan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sedangkan pada dini hari, berawan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara; serta hujan ringan di Kepulauan Seribu.

Adapun untuk rata-rata suhu udara hari ini di Jakarta, antara 24-31 derajat celcius dengan kelembapan udara mencapai 75-95 persen.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

400 Guru Honorer Dapat Bantuan Senilai 1 Juta Rupiah

Kesra 16 Nov, 2021 Reporter: Farandy Purba | Editor: Andreas Pamakayo



Guru honorer dari sejumlah sekolah di wilayah Jakarta Pusat memperoleh bantuan dari Baznas Bazis. Foto: Malik Maulana

Sebanyak 400 guru honorer dari sejumlah sekolah di wilayah Jakarta Pusat memperoleh bantuan senilai 1 juta rupiah dari Bazis Baznas.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma di pelataran Mesjid Al-Fauz, kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (16/11).

"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka memberikan kontribusi peningkatan kehidupan dari guru-guru

yang honorer," ucap Dhany membuka sambutannya.

Dhany melanjutkan, apa yang dilakukan hari ini juga merupakan suatu bentuk penghargaan atas dedikasi dan upaya yang baik kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.

"Karena memang kita menyadari peran guru atau tenaga kependidikan itu sangat penting dan strategis dalam melakukan investasi jangka panjang bagi putra putri kita. Jadi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional bapak ibu lah para pahlawannya," ujar mantan Kadis Dukcapil Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Terakhir, Dhany berharap para guru honorer dapat bergabung sebagai aparatur sipil negara dengan mengikuti rekrutmen jalur P3K dan CPNS.

"Semoga bapak ibu bisa segera bergabung karena memang keberadaannya sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup besar. Yang diprioritaskan itu adalah tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan. Jadi bukan tidak mungkin ke depan mudah-mudahan saja bisa bergabung menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Bazis Kota Administrasi Jakarta Pusat Ali Ridho mengatakan, pihaknya mengeluarkan dana sebesar 400 juta rupiah yang merupakan hasil penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) baik dari ASN, pengusaha, masyarakat, maupun dari sumber lainnya.

Untuk bantuan yang disalurkan kepada setiap guru honorer, lanjutnya, senilai 1 juta rupiah dengan mekanisme transfer ke rekening penerima bantuan senilai 700 ribu rupiah.

"Untuk 300 ribunya berupa sembako. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dibantu oleh pihak Bank DKI Kantor Cabang Wali Kota Jakarta Pusat," ujar Ali.

Di tempat yang sama, Atjep salah satu guru honorer yang telah mendedikasikan dirinya sebagai tenaga pendidik selama 34 tahun mengucapkan rasa syukurnya dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan.

Atjep mengungkapkan, sebagai guru honorer bantuan ini sangatlah berarti. Ia juga berharap ke depannya agar kegiatan-kegiatan seperti ini terus ditingkatkan demi meningkatkan kualitas dari para guru khususnya dalam menghadapi masa-masa kehidupan yang semakin sulit di tengah pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah ini merupakan wujud dari kepedulian terhadap rekan guru di dalam kondisi seperti ini dan ini merupakan suatu anugerah juga buat kami di dalam menjalankan tugas sebagai guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi masa depan anak-anak bangsa," tutupnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : ①, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Pemkot Siapkan Posko Bencana

Pemerintahan 16 Nov, 2021 Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo



Persiapan gladi posko bencana di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (16/11). Foto: Lailatul Farha PKL

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) tengah mempersiapkan posko bencana antisipasi musim hujan.

Dalam persiapan posko bencana ini dihadiri Unit Kerja Perangkat Daerah serta jajaran terkait di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Pusat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan rencana kontinjensi sekaligus mitigasi bencana di musim penghujan dengan mendirikan posko bencana.

Ia mengharapkan, nantinya peran posko bencana dapat lebih efektif dalam merespon situasi dan koordinasi pada posko yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Bagaimana peran posko pengungsian, bantuan-bantuan logistik kemudian evakuasi bencananya ini harus dipersiapkan. Kita buat skenarionya minimal ketika terjadi kita tidak kalang kabut," ungkapnya usai persiapan gladi posko bencana di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (16/11).

Dhany menjelaskan, nanti pihaknya akan membuat satu posko bencana di tingkat kota, delapan posko tingkat kecamatan, 44 posko tingkat kelurahan, serta posko di lokasi rawan genangan. Untuk posko rawan genangan nantinya selain posko pengungsian ada posko dapur umum.

"Ketika di situ ada potensi banjir maka posko pengungsiannya ada, posko dapur umumnya ada, kemudian untuk evakuasinya ketika terjadi gangguan kesehatan gitu ya itu harus disiapkan semuanya," tandasnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA	1. Indo Pos 2. JawaPos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. LampuHijau 7. Media Indonesia 8. Nonstop 9. Poskotanews.com 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. HarianTerbit 17. SinarHarapan 18. Pusat.jakarta.go.id
--------------	--	---	---	---

Halaman : ① 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Sudin Citata Jakarta Pusat Mulai Pemberkasan Yustisi

Perekonomian & Pemb 16 Nov, 2021 Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo



Suasana pemberkasan terhadap subjek pelanggaran bangunan. Foto: Lailatul Farha PKL

Suku Dinas (Sudin) Cipta Karya Tata Ruang dan Petanahan (Citata) mulai melakukan pemberkasan terhadap 400 orang subjek pelanggaran bangunan di wilayah Jakarta Pusat, Selasa (16/11).

Kepala Seksi Penindakan Sudin Citata Kota Administrasi Jakarta Pusat Syahrudin menerangkan, saat ini jajaran Sudin Citata sudah mulai melakukan pemberkasan dan penyidikan para pelanggaran bangunan di wilayah Jakarta Pusat periode tahun 2020-2021.

Menurutnya, ada 400 orang yang dipanggil. Di tingkat kota ada 100 orang dibagi dalam dua hari, Selasa dan Kamis mendatang. Sisanya dipanggil dan pemberkasan di tingkat kecamatan.

"Hari ini ada 50 orang yang diperiksa, pemberkasan dan penyidikan dibagi dalam dua sesi pagi dan siang," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

"Yang dipanggil di tingkat kota para pelanggaran non rumah tinggal sampai delapan lantai, sementara rumah tinggal tidak sesuai izin di lingkup kecamatan," imbuhnya.

Usai pemberkasan dan penyidikan ini, lanjut Syahrudin, pihaknya akan melakukan sidang yustisi bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang akan dilakukan pada 2 Desember 2021 mendatang secara offline karena situasi PPKM level 1.

"Jadi hakim yang akan memutuskan para pelanggaran didenda berapa sesuai Perda 10 tahun 2012. Kami biasanya kasih rekomendasi denda paling mahal itu Rp50 juta atau kurungan 6 bulan," jelasnya.

Terkait berkas yang diperiksa Syahrudin mengatakan, ada beberapa berkas yang diperiksa seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan bukti kepemilikan bangunan. Para pelanggaran biasanya melanggar jarak bebas belakang dan garis sepadan bangunan.

"Jadi pointnya yang diperiksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan bangunan di lapangan dengan IMB yang diterbitkan PTSP," tandasnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : ①, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Sudin Nakertrans dan Energi Siapkan Delapan Genset Bantu Korban Bencana

Perekonomian & Pemb 16 Nov, 2021 Reporter: H. A. Daelani | Editor: Andreas Pamakayo



Pemeriksaan rutin kesiapan genset. Foto: H. A. Daelani

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menyiapkan delapan unit genset untuk pasokan energi listrik di titik pengungsian saat terjadi bencana.

Kepala Sudin Nakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Fidyah Rokhim mengatakan, pihaknya memiliki delapan unit genset dengan daya kapasitas bervariasi mulai dari 10 KVA dua unit, 12.5 KVA dua unit, 80 KVA dua unit, dan 100 KVA dua unit.

"Kondisi genset seluruhnya dalam kondisi baik dan siap digunakan di lokasi pengungsian," kata Fidyah didampingi Kepala Seksi Energi Sudin Nakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Bambang Prayitno, Selasa (16/11).

Menurutnya, genset tersebut nantinya digunakan bukan untuk menghidupkan lampu di rumah warga di lokasi bencana baik kebakaran maupun banjir, melainkan untuk penerangan di posko darurat.

"Jadi kita suplai pasokan listrik untuk tenda pengungsian kita cukupi. Termasuk penerangan di tenda pengungsian dan tempat pengungsian saat banjir atau kebakaran," ungkapnya.

"Kita pasti mendukung pasokan energi listrik di titik pengungsian apabila terjadi banjir di lokasi tersebut," tegas Fidyah.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Siagakan Truk Tangki Antisipasi Genangan

Perekonomian & Pemb 16 Nov, 2021 Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo



Ilustrasi. Foto: dok Andreas Pamakayo

Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) menyiapkan truk tangki untuk mengantisipasi genangan.

Hal ini diungkapkan Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat Mila Ananda saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (16/11).

Menurut Mila, keberadaan truk tangki milik Sudin Pertamanan dan Hutan Kota ini dapat dimanfaatkan untuk pendistribusian air bersih. Maupun untuk melakukan pengurusan pasca-banjir.

"Kita bisa memanfaatkan truk tangki ini untuk penyemprotan pasca-banjir kita tinggal kasih carbol dan disinfektan," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Mila, pada lokasi yang tergenang banjir, truk tangki ini juga bisa dimanfaatkan untuk penyedotan air. Sehingga wilayah yang tergenang banjir dapat lebih cepat surut.

"Sementara kita siapkan lima unit, namun kalau masih dibutuhkan akan kami tambah tergantung urgensinya," jelasnya.

Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat juga akan menyiapkan satu unit mobil jenazah untuk antisipasi korban banjir.

Instruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



HUBUNGAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 16 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : ①, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Pola Kerja PNS Sudah Diatur Dalam Pergub 183 Tahun 2017

Pemerintahan 16 Nov, 2021 Reporter: H. A. Daelani | Editor: Andreas Pamakayo



Pembinaan dan monitoring kinerja pegawai di lingkungan kantor Kelurahan Menteng, Selasa (16/11). Foto: H. A. Daelani

Terkait pola kerja, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 183 tahun 2017 tentang pakaian dinas. Di sini PNS harus bernampilan rapi dengan berpakaian seragam lengkap.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik (KKPP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Munjir Munaji saat melakukan pembinaan dan monitoring kinerja pegawai di lingkungan kantor Kelurahan Menteng, Selasa (16/11).

"Sebagai PNS itu harus memakai seragam lengkap seperti pakaian dinas harian (PDH) sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan PDH warna coklat tua, celana harus polos tidak boleh dirempel, sepatu van topel warna hitam serta jangan pakai ban pinggang kulit," ujar Munjir.

Menurutnya dengan berpakaian lengkap PDH, supaya tidak ada kesenjangan dan perbedaan antar pegawai. PNS dibutuhkan figur sehingga dalam pelayanan warga merasa nyaman.

"Mulai sekarang, ayo kita rubah pola kerja kita dengan berpakaian PDH lengkap agar penampilan kita lebih rapi," tandasnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada